

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah sarana penting yang saat ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak di zaman sekarang, sebagai tolak ukur dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia dan diharapkan memiliki kualitas pendidikan yang maju seperti di Negara lain. Selain itu, pendidikan juga dapat dianggap sebagai alat untuk menciptakan kualitas dan karakter sebuah bangsa. Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang memberi simpati besar pada pendidikan dan dapat mencapai prestasi unggul dalam dunia pendidikan. yang diinginkan dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik agar tidak hanya memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memiliki moralitas yang baik, kesehatan yang optimal, pengetahuan yang luas, kecakapan, kreativitas, kemandirian, serta Menjadi bagian dari masyarakat yang menghormati demokrasi dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar (Sari et al., 2021). Tujuan pendidikan dapat tercapai karena adanya peran Pemerintah di dalamnya, pemerintah juga harus ikut andil dalam menciptakan sarana pendidikan yang bermutu dan membantu membiayai program pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta pendidikan sederajatnya.

Pemerintah merencanakan program Wajib Belajar Pendidikan selama dua belas tahun karena anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan dasar minimal dua belas tahun. Namun, program ini masih dalam proses persetujuan (Amiini, 2016). Sebagian besar anak di Indonesia menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal atau tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah keuangan. Pemerintah memberikan solusi yaitu bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu meringankan segi financial para wali murid.

Menurut PP 18 tahun 2022 tentang Perubahan PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non-personalia atau biaya tidak langsung, seperti

transportasi, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, pajak, asuransi, dan lain-lain, serta biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Namun, karena dana BOS berasal dari dana APBN, Beberapa bentuk investasi dan pembiayaan untuk keperluan personalia dapat didukung oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, prosedur keuangan terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suandi, 2019). Dana BOS akan berhasil jika pengelolaan dana dan sumberdaya di dalamnya baik. Keberhasilan sekolah dalam menangani pengelolaan dana BOS dengan pendekatan yang terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, menunjukkan pentingnya efektivitas pengelolaan dana BOS (Fitri, 2014).

Menurut Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang juga dikenal sebagai Dana BOS, diterapkan untuk mendanai belanja nonpersonalia untuk sekolah dasar dan menengah yang menerapkan program wajib belajar. Pengelolaan dana BOS dalam pelaksanaannya wajib berpedoman pada Permendikbudristek No 63 Tahun 2022. Penggunaan dana BOS harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Program ini harus mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yakni transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS mengindikasikan bahwa segala aspek pengelolaan dana tersebut dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan di sekolah. Sementara akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berarti bahwa sekolah mampu memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada pemerintah dan masyarakat (Rahayuningsih, 2021).

Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencakup tahap-tahap perencanaan alokasi dana BOS untuk SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo yang melibatkan pembahasan kebutuhan sekolah, analisis anggaran, serta penetapan alokasi dana sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah. Setelah dana BOS dialokasikan, langkah berikutnya adalah

pelaksanaan penatausahaan dana tersebut di sekolah. Hal ini mencakup penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pencatatan transaksi keuangan secara akurat, serta pengendalian internal untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. Aspek terakhir dari pengelolaan dana BOS adalah pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Sekolah harus menyajikan laporan keuangan yang jelas dan akurat, serta mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana BOS sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan dana BOS di sekolah. Masih banyak sekolah yang menolak untuk melaporkan kepada masyarakat tentang bagaimana dana BOS digunakan. Sekolah mencoba mengurangi partisipasi orang tua dan komite sekolah dengan menghadiri rapat, persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan penyelenggaraan Tanggung jawab yang sejalan dengan manajemen sekolah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS tercermin dari kurangnya publikasi dan belum dilakukannya audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS, menunjukkan minimnya peran serta komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah (Widyatmoko et al., 2017).

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo menghadapi beberapa kendala terutama terkait manajemen dana BOS. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya keterbatasan dalam proses pencairan dana BOS dari pemerintah pada awal tahun. Dana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, namun keterlambatan dalam pencairan dana BOS dapat menjadi kendala yang tidak begitu serius dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jika pencairan dana yang dimaksud mengalami keterlambatan, hal ini dapat menghambat jalannya kegiatan lainnya.

Pentingnya pengelolaan dana BOS untuk diteliti dan dapat kita sendiri ketahui bahwa banyak siswa yang putus sekolah dan beberapa kegiatan sekolah terhambat karena faktor biaya. Dengan demikian penelitian mengambil judul

“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo?
2. Bagaimana pelaksanaan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo?
3. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo.
3. Untuk menganalisis pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 3 Mimbaan Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berfungsi sebagai standar untuk mengelola keuangan sekolah, memungkinkan peningkatan kualitas

sekolah sesuai dengan kondisi keuangan sekolah.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang kebijakan terkait manajemen keuangan di lingkungan sekolah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi peneliti-peneliti berikutnya dan menjadi kontribusi tambahan dalam pembentukan judul penelitian yang baru.